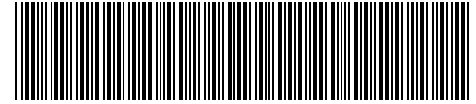




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 063.01.1.445170/2025**



DS:7798-3514-8425-4081

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 2. Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 4. Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
- Sebesar : Rp. 72.174.659.000 (TUJUH PULUH DUA MILIAR SERATUS TUJUH PULUH EMPAT JUTA ENAM RATUS LIMA PULUH SEMBILAN RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
07.01 OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	59.327.440.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	12.847.219.000	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN JAKARTA VI (175) Rp. 72.174.659.000

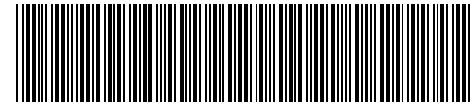
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025

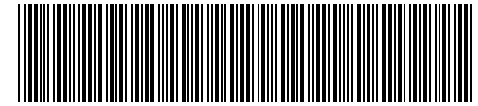


DS:7798-3514-8425-4081

Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Rp.	72.174.659.000
DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Rp.	4.717.849.000
DR.4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	Rp.	19.880.270.000
DR.4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Rp.	13.697.763.000
DR.4126	Registrasi Pangan Olahan	Rp.	14.544.177.000
DR.4130	Standardisasi Pangan Olahan	Rp.	5.627.163.000
DR.4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	Rp.	13.707.437.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 1

Program	: 063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	72.174.659.000
Kegiatan	: 3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.717.849.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Persentase Obat yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 2. 01	Persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan	
	: 3. 01	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 4. 01	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	
	: 5. 01	Persentase sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 6. 01	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 7. 02	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 8. 02	Persentase Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 9. 02	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di masing-masing wilayah kerja UPT	
	: 10. 02	Persentase laboratorium pengawasan obat dan makanan yang sesuai Good Laboratory Practise	
	: 11. 02	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	
	: 12. 03	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	
	: 13. 03	Jumlah desa pangan aman di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 14. 03	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 15. 03	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 16. 04	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 17. 04	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 18. 04	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 19. 05	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	
	: 20. 05	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di masing -masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 21. 06	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	
	: 22. 07	Persentase UMKM yang memenuhi standar	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 2

Klasifikasi Rincian Output	1	:	3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	9.900,00	Orang	2.964.360.000
Rincian Output		:	01 BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	9900.00	Orang	2.964.360.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3165.BKB	Pemantauan produk	5,00	laporan	1.753.489.000
Rincian Output		:	01 BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	5,00	laporan	1.753.489.000
Kegiatan		:	4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan			19.880.270.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan			
		:	2. 01	Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			
		:	3. 01	Persentase industri pangan olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan			
		:	4. 01	Persentase keputusan hasil pengawasan produksi pangan olahan yang diselesaikan sesuai standar			
		:	5. 01	Persentase sarana produksi pangan fortifikasi skala kecil yang meningkat kepatuhannya terhadap regulasi			
		:	6. 01	Persentase sarana produksi pangan olahan dalam kemasan risiko tinggi yang telah mendapatkan izin produksi			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	4120.ACD	Perizinan Lembaga	200,00	Institusi, Badan Usaha, Registrasi, Ketetapan	5.748.700.000
Rincian Output		:	01 ACD.001	Keputusan Izin Produksi Pangan Olahan Risiko Tinggi yang diselesaikan sesuai ketentuan	200,00	Ketetapan	5.748.700.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	4120.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.897.250.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Publik Pengawasan Produksi Pangan Olahan	2,00	layanan	2.897.250.000
Klasifikasi Rincian Output	5	:	4120.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	531,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	5.857.002.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	Keputusan Hasil Pengawasan Produksi Pangan Olahan yang diselesaikan Sesuai Standar	510,00	Keputusan	2.827.436.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 3

Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

	02	BIC.002	UPT yang melaksanakan pengawasan sarana produksi pangan olahan secara mandiri	21.00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan Lembaga	3.029.566.000
Klasifikasi Rincian Output	6	4120.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri	83,00	Industri, IKM, Miliar USD	3.167.287.000
Rincian Output	01	QDI.001	Industri Pangan Olahan yang proaktif dalam meningkatkan level pemenuhan regulasi sistem jaminan keamanan dan mutu pangan (PN)	58,00	Industri	2.000.000.000
	02	QDI.002	Sarana Produksi Pangan Fortifikasi skala Kecil yang diintervensi dalam rangka pendampingan pemenuhan kesesuaian pengendalian proses (PN)	25,00	Industri	1.167.287.000
Klasifikasi Rincian Output	7	4120.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	185,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	2.210.031.000
Rincian Output	01	UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan IRTP untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman (PN)	185,00	Kab/Kota	2.210.031.000
Kegiatan	4124		Pengawasan Peredaran Pangan Olahan			13.697.763.000
Indikator Kinerja Kegiatan	1. 01		Jumlah Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman			
	2. 01		Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)			
	3. 01		Jumlah Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu			
	4. 01		Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar			
	5. 01		Persentase lintas sektor yang menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan			
Klasifikasi Rincian Output	8	4124.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	55.903,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	2.297.502.000
Rincian Output	01	BAH.001	Surat Keterangan Ekspor Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	55900,00	dokumen	1.397.502.000
	02	BAH.002	Layanan Publik Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,00	layanan	900.000.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 4

Klasifikasi Rincian Output	9	:	4124.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk	3.897,00	Produk, Laporan, Keputusan	3.738.513.000
Rincian Output		:	01 BIA.001	Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Diselesaikan Sesuai Standar	3897,00	Keputusan	3.738.513.000
Klasifikasi Rincian Output	10	:	4124.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	261,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	3.052.915.000
Rincian Output		:	01 BIC.001	UPT yang melaksanakan pengawasan peredaran pangan olahan sesuai standar	61,00	Lembaga	700.000.000
Rincian Output		:	02 BIC.002	Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	200,00	Lembaga	2.352.915.000
Klasifikasi Rincian Output	11	:	4124.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	122,00	Lembaga, Laporan, Badan Usaha, Penyalur, Keputusan	2.440.000.000
Rincian Output		:	01 QIC.003	Laporan KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya (PN)	122,00	Laporan	2.440.000.000
Klasifikasi Rincian Output	12	:	4124.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah	170,00	Daerah (Prov/KabKota), Provinsi, KabKota	2.168.833.000
Rincian Output		:	01 UBA.001	Kab/Kota yang memenuhi standar pengawasan PIRT untuk mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman (PN)	170,00	Daerah (Prov/Kab/Kota)	2.168.833.000
Kegiatan		:	4126	Registrasi Pangan Olahan			14.544.177.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Registrasi Pangan Olahan			
		:	2. 01	Persentase pangan olahan dalam kemasan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan			
Klasifikasi Rincian Output	13	:	4126.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	9,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	5.149.606.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Publik Registrasi Pangan Olahan yang prima	9,00	layanan	5.149.606.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 5

Klasifikasi Rincian Output	14	:	4126.BDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM	1.650,00	UMKM	4.467.265.000
Rincian Output		:	01	BDG.001 Pelaku usaha yang diberikan pendampingan di bidang registrasi pangan olahan	1650.00	UMKM	4.467.265.000
Klasifikasi Rincian Output	15	:	4126.PCA	Perizinan Produk	63.000,00	Produk, Keputusan	4.927.306.000
Rincian Output		:	01	PCA.001 Keputusan Registrasi Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai ketentuan (PN)	63000.00	Keputusan	4.927.306.000
Kegiatan		:	4130	Standardisasi Pangan Olahan			5.627.163.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks kualitas kebijakan pengawasan pangan olahan			
Klasifikasi Rincian Output	16	:	4130.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	165,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	311.540.000
Rincian Output		:	01	ABG.001 Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, Gizi dan Manfaat Pangan Olahan yang Diselesaikan	165.00	Rekomendasi Kebijakan	311.540.000
Klasifikasi Rincian Output	17	:	4130.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	10,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	3.930.886.000
Rincian Output		:	01	AFA.001 Standar Pangan Olahan yang Disusun	8.00	NSPK	3.271.062.000
		:	02	AFA.002 Standar Produk Inovasi Pangan Olahan	2.00	NSPK	659.824.000
Klasifikasi Rincian Output	18	:	4130.CAB	Sarana Bidang Kesehatan	30,00	Paket, Unit	186.537.000
Rincian Output		:	01	CAB.001 Sarana Pengawasan Pangan Olahan	30.00	Unit	186.537.000
Klasifikasi Rincian Output	19	:	4130.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	56,00	Unit	838.184.000
Rincian Output		:	01	CAN.001 Perangkat pengolah data dan komunikasi	56.00	Unit	838.184.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



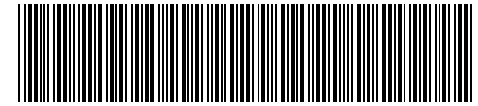
DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 6

Klasifikasi Rincian Output	20	:	4130.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	2,00	NSPK, Rancangan Standar, Pedoman, Standar	360.016.000
Rincian Output		:	01 PFA.003	Regulasi terkait pengaturan produk pangan olahan yang berdampak negatif bagi Kesehatan yang disusun	1,00	Standar	167.000.000
		:	02 PFA.004	Regulasi di bidang pangan olahan yang mendukung produksi dan konsumsi yang berkelanjutan yang disusun	1,00	Standar	193.016.000
Kegiatan		:	4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan			13.707.437.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:	1. 01	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Dit. PMPUPO			
		:	2. 01	Jumlah Kab/ Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif			
		:	3. 01	Jumlah Kab/ Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar			
		:	4. 01	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan			
		:	5. 01	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan			
		:	6. 02	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha			
Klasifikasi Rincian Output	21	:	4132.BAH	Pelayanan Publik Lainnya	2,00	layanan, bidang, dokumen, Miliar Rp, titik	300.000.000
Rincian Output		:	01 BAH.001	Layanan Konsultasi untuk Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	2,00	layanan	300.000.000
Klasifikasi Rincian Output	22	:	4132.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	76,00	Lembaga, Unit Kerja, Tim	3.143.051.000
Rincian Output		:	01 BDB.003	UPT yang diintervensi melakukan pemberdayaan masyarakat dan pendampingan pelaku usaha di bidang pangan olahan	76,00	Lembaga	3.143.051.000
Klasifikasi Rincian Output	23	:	4132.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	167,00	Orang	1.043.022.000
Rincian Output		:	01 BDC.001	Kader keamanan pangan nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	167,00	Orang	1.043.022.000

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I A. 7

Klasifikasi Rincian Output	24	:	4132.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat		250,00	Orang	3.567.173.000
Rincian Output		:	01	QDC.001	Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan (PN)	250,00	Orang	3.567.173.000
Klasifikasi Rincian Output	25	:	4132.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah		101,00	Daerah (ProvKabKota), Provinsi, KabKota	5.654.191.000
Rincian Output		:	01	UBA.001	Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat secara aktif (PN)	73,00	Kab/Kota	3.310.949.000
		:	02	UBA.002	Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market IRTP sesuai standar (PN)	28,00	Kab/Kota	2.343.242.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025

I B. SUMBER DANA



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
 Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : I B. 1

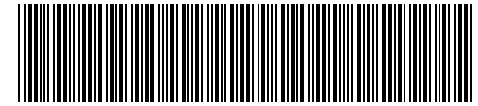
			Pagu		Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	72.174.659.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	59.327.440.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.	0
2. PNPB	Rp.	12.847.219.000		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0	
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0	
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0	
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0	

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



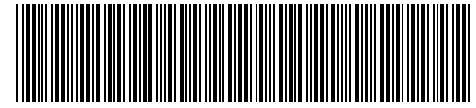
DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	-	68.916.438	3.258.221	-	-	72.174.659		
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan	-	68.916.438	3.258.221	-	-	72.174.659		
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	-	4.717.849	-	-	-	4.717.849		
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.964.360	-	-	-	2.964.360	01 . 51	
01	RM	-	2.964.360	-	-	-	2.964.360	175@	
3165.BKB	Pemantauan produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.753.489	-	-	-	1.753.489	01 . 51	
01	RM	-	1.753.489	-	-	-	1.753.489	175@	
4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	-	19.551.770	328.500	-	-	19.880.270		
4120.ACD	Perizinan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.649.700	99.000	-	-	5.748.700	01 . 51	
01	RM	-	4.649.700	99.000	-	-	4.748.700	175@	
04	PNBP	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4120.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.897.250	-	-	-	2.897.250	01 . 51	
01	RM	-	1.611.837	-	-	-	1.611.837	175@	
04	PNBP	-	1.285.413	-	-	-	1.285.413	175@	
4120.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.857.002	-	-	-	5.857.002	01 . 51	
01	RM	-	5.857.002	-	-	-	5.857.002	175@	
4120.QDI	Fasilitasi dan Pembinaan Industri (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.937.787	229.500	-	-	3.167.287	01 . 51	
01	RM	-	2.937.787	229.500	-	-	3.167.287	175@	
4120.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.210.031	-	-	-	2.210.031	01 . 51	
01	RM	-	2.210.031	-	-	-	2.210.031	175@	
4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	-	13.432.763	265.000	-	-	13.697.763		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



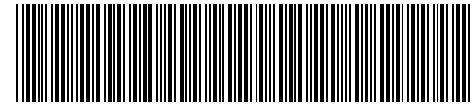
DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4124.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.122.502	175.000	-	-	2.297.502	01 . 51	
01	RM	-	2.122.502	175.000	-	-	2.297.502	175@	
4124.BIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.738.513	-	-	-	3.738.513	01 . 51	
01	RM	-	38.306	-	-	-	38.306	175	
04	PNBP	-	3.700.207	-	-	-	3.700.207	175@	
4124.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.962.915	90.000	-	-	3.052.915	01 . 51	
01	RM	-	2.962.915	90.000	-	-	3.052.915	175@	
4124.QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.440.000	-	-	-	2.440.000	01 . 51	
01	RM	-	2.440.000	-	-	-	2.440.000	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4124.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	2.168.833	-	-	-	2.168.833	01 . 51	
01	RM	-	2.168.833	-	-	-	2.168.833	175@	
4126	Registrasi Pangan Olahan	-	13.394.177	1.150.000	-	-	14.544.177		
4126.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.999.606	1.150.000	-	-	5.149.606	01 . 51	
01	RM	-	3.981.530	1.150.000	-	-	5.131.530	175@	
04	PNBP	-	18.076	-	-	-	18.076	175	
4126.BDG	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.467.265	-	-	-	4.467.265	01 . 51	
01	RM	-	3.111.865	-	-	-	3.111.865	175@	
04	PNBP	-	1.355.400	-	-	-	1.355.400	175@	
4126.PCA	Perizinan Produk (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	4.927.306	-	-	-	4.927.306	01 . 51	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01 RM		-	4.160.256	-	-	-	4.160.256	175@	
04 PNBP		-	767.050	-	-	-	767.050	175@	
4130	Standardisasi Pangan Olahan	-	4.602.442	1.024.721	-	-	5.627.163		
4130.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	311.540	-	-	-	311.540	01 . 51	
01 RM		-	311.540	-	-	-	311.540	175@	
4130.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.930.886	-	-	-	3.930.886	01 . 51	
01 RM		-	2.916.467	-	-	-	2.916.467	175@	
04 PNBP		-	1.014.419	-	-	-	1.014.419	175@	
4130.CAB	Sarana Bidang Kesehatan (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	186.537	-	-	186.537	01 . 51	
04 PNBP		-	-	186.537	-	-	186.537	175	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

Halaman : II. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4130.CAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	-	838.184	-	-	838.184	01 . 51	
04	PNBP	-	-	838.184	-	-	838.184	175	
4130.PFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	360.016	-	-	-	360.016	01 . 51	
01	RM	-	360.016	-	-	-	360.016	175@	
4132	Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	-	13.217.437	490.000	-	-	13.707.437		
4132.BAH	Pelayanan Publik Lainnya (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 51	
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000	175@	
4132.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.143.051	-	-	-	3.143.051	01 . 51	
01	RM	-	2.849.006	-	-	-	2.849.006	175@	
04	PNBP	-	294.045	-	-	-	294.045	175@	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN
Kewenangan : (KP)

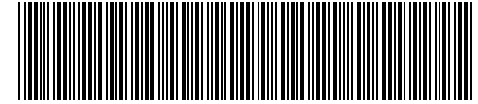
Halaman : II. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4132.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	1.043.022	-	-	-	1.043.022	01 . 51	
01	RM	-	652.352	-	-	-	652.352	175@	
04	PNBP	-	390.670	-	-	-	390.670	175@	
4132.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	3.417.173	150.000	-	-	3.567.173	01 . 51	
01	RM	-	2.584.358	150.000	-	-	2.734.358	175@	
04	PNBP	-	832.815	-	-	-	832.815	175@	
4132.UBA	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah (01.51 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA PUSAT)	-	5.314.191	340.000	-	-	5.654.191	01 . 51	
01	RM	-	4.149.788	340.000	-	-	4.489.788	175@	
04	PNBP	-	1.164.403	-	-	-	1.164.403	175@	
JUMLAH		-	68.916.438	3.258.221	-	-	72.174.659		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN													
		RENCANA PENARIKAN DANA	611.550	3.051.314	4.981.719	4.421.529	6.733.844	7.107.412	6.681.463	5.714.524	7.501.158	9.293.865	8.854.787	7.221.493	72.174.659
		BELANJA BARANG	611.550	3.048.676	4.929.763	4.094.061	6.477.287	6.726.732	6.415.500	5.433.586	7.355.820	9.170.607	7.546.517	7.106.339	68.916.438
		BELANJA MODAL	0	2.638	51.956	327.468	256.557	380.680	265.963	280.938	145.338	123.258	1.308.270	115.155	3.258.221
	063.01.DR.3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	24.046	56.450	488.277	232.733	685.190	634.362	664.912	661.920	382.710	396.142	221.047	270.060	4.717.849
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	24.046	56.450	488.277	232.733	685.190	634.362	664.912	661.920	382.710	396.142	221.047	270.060	4.717.849
	063.01.DR.4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan	397.605	1.179.999	1.392.600	994.000	1.403.816	2.486.022	1.192.000	1.590.400	2.186.800	2.982.000	2.087.000	1.988.029	19.880.270
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	397.605	1.179.999	1.392.600	994.000	1.339.316	2.486.022	1.192.000	1.425.400	2.186.800	2.982.000	1.988.000	1.988.029	19.551.770
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	64.500	0	0	165.000	0	0	99.000	0	328.500
	063.01.DR.4124	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	0	800.978	1.201.468	1.509.964	1.601.957	1.735.453	1.067.971	800.978	800.978	1.334.964	1.508.086	1.334.964	13.697.763
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	800.978	1.201.468	1.334.964	1.601.957	1.735.453	1.067.971	800.978	800.978	1.334.964	1.418.086	1.334.964	13.432.763
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	175.000	0	0	0	0	0	0	90.000	0	265.000
	063.01.DR.4126	Registrasi Pangan Olahan	106.670	742.635	1.092.948	882.996	1.564.962	858.375	1.739.279	758.390	1.326.607	1.798.935	2.441.081	1.231.299	14.544.177
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	106.670	742.635	1.092.948	882.996	1.564.962	858.375	1.739.279	758.390	1.226.607	1.748.935	1.441.081	1.231.299	13.394.177
		53 BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	50.000	1.000.000	0	1.150.000
	063.01.DR.4130	Standardisasi Pangan Olahan	79.582	159.261	621.887	546.665	950.641	809.304	547.867	438.789	278.707	318.522	358.338	517.599	5.627.163

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : (063) BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : (01) Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (445170) DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : III. 2
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
063.01.DR.4132		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	79.582	159.261	573.887	398.153	766.497	475.035	318.522	358.338	278.707	318.522	358.338	517.599	4.602.442	
		53 BELANJA MODAL	0	0	48.000	148.512	184.144	334.269	229.345	80.451	0	0	0	0	1.024.721	
		Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3.648	111.990	184.539	255.171	527.279	583.896	1.469.433	1.464.046	2.525.355	2.463.301	2.239.236	1.879.543	13.707.437	
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	3.648	109.353	180.583	251.215	519.366	537.485	1.432.815	1.428.559	2.480.017	2.390.043	2.119.966	1.764.388	13.217.437	
		53 BELANJA MODAL	0	2.638	3.956	3.956	7.913	46.411	36.618	35.487	45.338	73.258	119.270	115.155	490.000	
		PERKIRAAN PENERIMAAN	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.245	3.788.255	45.458.950
		- PNBP (425321)	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.583	59.587	715.000
		- PNBP (425321)	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.329	2.420.331	29.043.950
		- PNBP (425321)	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.333	1.308.337	15.700.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
445170	DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN	4120	Pengawasan Produksi Pangan Olahan
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 39.702.672	4120.ACD	Perizinan Lembaga
	52 Belanja Barang Rp. 38.453.672	521211	Belanja Bahan(RM)
	53 Belanja Modal Rp. 1.249.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 64.075
063.01.DR	Program Pengawasan Obat dan Makanan		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
3165	Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
3165.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 250.000
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.455		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
3165.BKB	Pemantauan produk		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 120.000
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 80.715	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.640
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.700	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 18.000
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.293	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.928.949
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 16.380	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.600

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	4120.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.480	521111	Belanja Keperluan Perkantoran(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 259.200	521211	Belanja Bahan(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.865
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 307.400	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.680.020	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 498.400	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.000
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 156.000	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 132.500
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM)	Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 99.000	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.740

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	522141	Belanja Sewa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 176.400		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 478.075		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 95.200
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 603.102		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 300.000
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(PNBP)	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 972.081		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.274.740
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP)	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 288.057		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.800
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4120.BIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	521211 Belanja Bahan(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.898.842
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.050		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN	
4120.QDI	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 317.646 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 90.646 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4124 4124.BAH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 399.885 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 295.218 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 293.693 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	
	4120.UBA		Fasilitas dan Pembinaan Industri 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 568.686 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.300 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.352 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 458.002 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Pengawasan Peredaran Pangan Olahan
			Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	Pelayanan Publik Lainnya 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 170.380 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4124.BIA	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	4124.BIC	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 125.000		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 51.450
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 195.849		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 491.464
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.600		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 301.971
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 620.528	521211 Belanja Bahan(RM)		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.320		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.375	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.000		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		
524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM)	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 143.129	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 537.480		
Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		
Pengawasan dan Pengendalian Produk	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		
Tidak Dapat Dicairkan Rp. 548.644	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.520		
Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024			

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN		
4124.QIC	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 322.150 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 380.340 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4124.UBA	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 525.400 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 21.100 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 96.200 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 290.600 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		4126	Registrasi Pangan Olahan	
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 536.400 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden			4126.BAH	Pelayanan Publik Lainnya
	Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait				521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 46.850 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 146.160 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden				Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.150 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 571.740 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden				Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 577.740 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden				
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya				
	524211 Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 403.716				

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
522131	Belanja Jasa Konsultan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 500.000 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	4126.BDG	Fasilitas dan Pembinaan UMKM
522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 69.800 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	521211	Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 74.005 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 67.380 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 29.150 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 91.200 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 11.600 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 352.885 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 849.000 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 702.932 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 1.355.400 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
536121	Belanja Penambahan Nilai Fisik Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Rp. 1.150.000 Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 1.223.910 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Rp. 924.200 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 8
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
4126.PCA	Perizinan Produk		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 73.388 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4130.AFA	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.495 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.225 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522151	Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 119.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 771.480 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	522191	Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 54.039 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 383.525 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 63.505 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 677.885 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.370 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524219	Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 275.851 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.850 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4130	Standarisasi Pangan Olahan	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 408.027 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
4130.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 9
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN		
4130.PFA	(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 40.268 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 413.971 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 138.080 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524219 Belanja Perjalanan Dinas Lainnya - Luar Negeri(PNBP) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 229.173 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	4132.BDB	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.000 Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga 521111 Belanja Keperluan Perkantoran(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 47.300 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 72.200 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 521211 Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 335.862 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522141 Belanja Sewa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 45.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522151 Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 376.000 Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden Disposisi: Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait 522191 Belanja Jasa Lainnya(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 55.000		
	4132		Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan		
	4132.BAH		Pelayanan Publik Lainnya		
			524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.140		

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



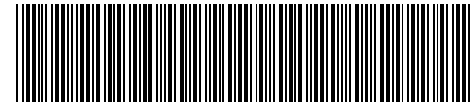
DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.A. 10
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Perlu mendapatkan persetujuan/arahan presiden		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
Disposisi:	Alokasi harus dilengkapi dasar hukum pengalokasiannya dan/atau dokumen terkait		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	4132.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 822.300		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 27.261
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 173.100		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.275
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 11.360		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.513
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(PNBP)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.000		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 192.500
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.045.934		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(PNBP)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 104.398
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(PNBP)	4132.QDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 33.975		524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 280.270
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Arahan Presiden pada Sidang Kabinet tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 6 November 2024
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.000		

**DAFTAR ISI AN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV A. B L O K I R**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

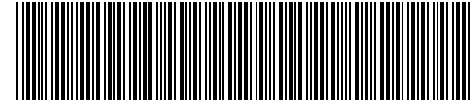
Halaman : IV.A. 12
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 063.01.1.445170/2025
IV B. C A T A T A N**



DS:7798-3514-8425-4081

Kementerian Negara/Lembaga : [063] BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Organisasi : [01] Badan Pengawas Obat dan Makanan
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [445170] DEPUTI III BIDANG PENGAWASAN PANGAN OLAHAN

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Sekretaris Utama Badan POM

ttd.
Jayadi
NRP. 69120503